

Strategi Penerapan Ekonomi Pancasila dalam Pemberdayaan UMKM Menuju Transformasi Era Digital di Masa Pandemi

*(Strategy for the Implementation of the Pancasila Economy in Empowering
MSMEs Towards Digital Era Transformation in the Pandemic Period)*

Oleh:

Nani Juwantini; Luthfi Khoirun Nisa; Novtri Mariatie; Taufiq Rachman

Magister Manajemen Universitas Pelita Bangsa

nanijuwantini0812@gmail.com; luthfinisa329@gmail.com; nov3.journey@gmail.com;

tfqman@gmail.com

ABSTRAK

Pandemi Covid 19 berdampak terhadap berbagai sektor terutama di sektor ekonomi. Dampak perekonomian ini tidak hanya di rasakan secara domestik, namun juga terjadi secara global. Strategi pemasaran dalam berwirausaha pada sektor ekonomi kreatif yang dilakukan oleh UMKM yang merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh rakyat, dimana rakyat secara swadaya mengelola sumberdaya ekonomi yang mereka kuasai. UMKM saat ini sedang berubah pemasarannya menuju era globalisasi (online) dengan memasarkan produknya melalui market place. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penerapan ekonomi berbasis Pancasila yang berubah menuju era digital dan kepedulian pemerintah daerah terhadap UMKM di masa pandemi. Artikel ini menggunakan metode studi kepustakaan dengan mengelaborasi berbagai literatur dan jurnal, dan publikasi di internet. Hasil analisis pada artikel ini menyimpulkan bahwa pengembangan UMKM digital telah menjadi alternatif penyelamatan sekaligus pengembangan kewirausahaan digital di Indonesia pada masa pandemi Covid. Pengembangan UMKM digital juga menjadi salah satu strategi agar UMKM tetap eksis di masa pandemi Covid-19. Berbagai program pengembangan digitalisasi UMKM dapat mempercepat proses transformasi digital dalam ekosistem ekonomi digital Pancasila di Indonesia. Faktor pendukung dalam berwirausaha di sektor ekonomi kreatif yang menerapkan sistem ekonomi berbasis ekonomi Pancasila pada masa pandemi Covid-19 adalah promotion, service excellet, customers rewards, afiliasi atau kemitraan dan modal sosial.

Kata kunci:

Pemberdayaan UMKM Digital, Warganet, Covid-19

ABSTRACT

The COVID-19 pandemic has had an impact on various sectors, especially in the economic sector. This economic impact is not only felt domestically, but also globally. Marketing strategy in entrepreneurship in the creative economy sector carried out by SMEs which is an economic activity carried out by the people, where the people independently manage the economic resources they control. SMEs are currently changing their marketing towards the era of globalization (online) by marketing their products through the market place. The purpose of this study is to determine the application of a Pancasila-based economy that is changing towards the digital era and the local government's concern for SMEs during the pandemic. This article uses the literature study method by elaborating various literatures and journals, and publications on the internet. The results of the analysis in this article conclude that the development of digital SMEs has become an alternative to saving as well as developing digital entrepreneurship in Indonesia during the Covid pandemic. The development of digital SMEs is also one

of the strategies so that SMEs can still exist during the Covid-19 pandemic. Various SME digitalization development programs can accelerate the digital transformation process in the Pancasila digital economy ecosystem in Indonesia. Supporting factors in entrepreneurship in the creative economy sector that implement a Pancasila-based economic system during the Covid-19 pandemic are promotion, excellent service, customer rewards, affiliations or partnerships and social capital.

Keywords:

Digital SME empowerment, Warganet, Covid-19

Pendahuluan

Pakar Ekonomi, Nurul Istiqomah, SE, M.Si, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret (FEB UNS) berpendapat bawah krisis yang terjadi pada tahun 2020 ini adalah krisis kesehatan publik serta humanitarian terbesar, dimana tidak saja menimbulkan kedaruratan kesehatan melainkan juga memberikan kerugian secara ekonomi yang cukup besar. Hampir semua sektor terkena imbasnya, dan sektor yang paling berat terkena pandemi Covid-19 adalah sektor pariwisata karena terhentinya usaha disebabkan social distancing. Sektor tersebut diprediksikan baru pulih pada tahun 2022. Sedangkan di sektor keuangan, terdapat ancaman ketidak mampuan dunia usaha untuk melakukan pembayaran pinjaman.

Untuk mengatasi keterpurukan ekonomi rakyat, maka di cari solusi terbaik dengan strategi dan beberapa program yang dilakukan, umpama bantuan sosial, percepatan pelaksanaan Kartu Prakerja serta pemotongan tagihan listrik. Berdasarkan pernyataan Imaduddin Abdullah (pengamat ekonomi Indef) menyatakan bahwa negara-negara yang berhasil mengatasi dampak Covid-19 melakukan stimulus fiskal di sektor kesehatan, pengurangan dampak negative Covid-19 melakukan stimulus fiskal disektor kedaruratan kesehatan, melainkan juga memberikan kerugian secara ekonomi yang cukup besar. Beberapa program yang dilakukan tersebut adalah bantuan sosial, percepatan pelaksanaan Kartu Prakerja serta pemotongan tagihan listrik.

Dampak dari Pandemi ini sangat dirasakan di semua negara dunia telah banyak mempengaruhi semua sektor kehidupan masyarakat. Di Indonesia, hampir semua sektor mengalami terutama ekosistem ekonomi yang selama ini telah menjadi tumpuan masyarakat. Lebih lanjut, pandemi Covid-19 telah membuat terjadinya pelambatan sektor ekonomi di Indonesia dengan berbagai turunannya. Sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang merupakan bagian terpenting dari sektor ekonomi sangat merasakan dampaknya. Inilah yang dikhawatirkan oleh semua pihak, karena telah membuat sektor UMKM mengalami kemunduran yang signifikan.

Peran penting Pemerintah daerah harus memberikan perhatian bagi memberikan kontribusi yang nyata bagi UMKM dalam mempertahankan produk yang ada pada saat banyak serbuan produk impor yang masuk dipasaran dalam negeri. UMKM yang banyak tumbuh di berbagai daerah harus dikembangkan oleh pemerintah daerah, karena menjadi salah satu kunci bagi peningkatan ekonomi daerah. Pemberdayaan merupakan salah satu tugas pemerintah untuk mengangkat serta memberikan dukungan kepada masyarakat secara nyata agar memiliki kemampuan untuk mengembangkan potensi yang ada di dalam masyarakat dengan pengembangan pada usaha lokal yang akan tercipta suatu lapangan pekerjaan untuk masyarakat, serta mengembangkan inovasi masyarakat secara mandiri untuk memenuhi kebutuhan ekonomi rakyat. Dan demi kelangsungan hidup negara dan bangsa Indonesia di era globalisasi, mengharuskan kita untuk melestarikan nilai-nilai Pancasila. Hal ini menarik untuk dikaji bersama dengan berlandaskan pada dasar negara kita Pancasila yang memiliki asas kekeluargaan dan gotong royong, agar generasi penerus bangsa tetap dapat menghayati dan

mengamalkannya, serta intisari nilai-nilai yang luhur itu tetap terjaga sebagai pedoman bangsa Indonesia sepanjang masa.

Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia harus senantiasa kita jaga dan sebagai pembimbing interaksi antar individu dan kelompok yang ada. Namun pada kenyataannya nilai-nilai Pancasila cenderung ditinggalkan dalam praktek kehidupan. Sebagai dampaknya eksistensi bangsa Indonesia yang pluralis pun kini terancam karena kebebasan yang kebablasan. Eksistensi bangsa Indonesia yang pluralistik terancam jika dasar negara dan konstitusi (Pancasila dan UUD 1945) tidak dijadikan ukuran dan acuan dalam berpikir serta berperilaku sebagai warga negara, sementara gempuran globalisasi terus menerus terjadi. Demi kelangsungan hidup negara dan bangsa Indonesia di era globalisasi, mengharuskan kita untuk melestarikan nilai-nilai Pancasila. Hal ini menarik untuk dikaji bersama dengan berlandaskan pada dasar negara kita Pancasila yang memiliki asas kekeluargaan dan gotong royong, agar generasi penerus bangsa tetap dapat menghayati dan mengamalkannya, serta intisari nilai-nilai yang luhur itu tetap terjaga sebagai pedoman bangsa Indonesia sepanjang masa. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia harus senantiasa kita jaga dan sebagai pembimbing interaksi antar individu dan kelompok yang ada. Namun pada kenyataannya nilai-nilai Pancasila cenderung ditinggalkan dalam praktek kehidupan. Sebagai dampaknya eksistensi bangsa Indonesia yang pluralis pun kini terancam karena kebebasan yang kebablasan. Eksistensi bangsa Indonesia yang pluralistik terancam jika dasar negara dan konstitusi (Pancasila dan UUD 1945) tidak dijadikan ukuran dan acuan dalam berpikir serta berperilaku sebagai warga negara, sementara gempuran globalisasi terus menerus terjadi.

Berdasarkan Identifikasi masalah diatas, maka penulis merumuskan dalam artikel ini bagaimana strategi penerapan ekonomi Pancasila dalam pemberdayaan UMKM menuju era digital dimasa pandemi. Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan perkembangan UMKM dimasa pandemi, peran pemerintah daerah dalam membantu kelangsungan UMKM penerapan ekonomi berbasis Pancasila pada UMKM, dan menjelaskan strategi untuk kelangsungan pemasaran produk UMKM menuju era digital.

Metode Penelitian

Metode penelitian pada artikel ini adalah deskriptif kualitatif, yang menggambarkan keadaan, kondisi, situasi, peristiwa, kegiatan dan lain lain. Data yang dihasilkan adalah data kualitatif, yaitu data yang diwujudkan dalam kata keadaan atau kata sifat. Deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang menggambarkan suatu kondisi maupun peristiwa yang diwujudkan dalam bentuk kata. Data penelitian bersumber dari data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku, jurnal, pustaka, website, dokumen yang ditulis oleh orang lain. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda dan sebagainya. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi, yaitu melalui sintesa yang berasal dari pustaka, observasi, wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi.

Hasil Penelitian

A. Era Globalisasi

Masuknya era globalisasi menjadikan bangsa dunia hampir tidak memiliki batas. Bahkan Mubyarto (1999) mengatakan globalisasi memang bukan musuh yang harus diperangi. Namun tetap saja kita harus waspada menghadapinya, jika kita tidak ingin di"jarah"nya. Globalisasi

memiliki dampak baik dan buruk. Saat ini dampak tersebut sudah masuk dan dirasakan apalagi jika berkaitan dengan perekonomian, masuknya globalisasi tentu akan diikuti adanya paham kapitalis yang sangat individualis dan menjunjung asas keuntungan semata.

Demi kelangsungan hidup negara dan bangsa Indonesia di era globalisasi, mengharuskan kita untuk melestarikan nilai-nilai Pancasila. Hal ini menarik untuk dikaji bersama, dengan berlandaskan pada dasar negara kita Pancasila yang memiliki asas kekeluargaan dan gotong royong, agar generasi penerus bangsa tetap dapat menghayati dan mengamalkannya, serta intisari nilai-nilai yang luhur itu tetap terjaga sebagai pedoman bangsa Indonesia sepanjang masa. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia harus senantiasa kita jaga dan sebagai pembimbing interaksi antar individu dan kelompok yang ada. Namun pada kenyataannya nilai-nilai Pancasila cenderung ditinggalkan dalam praktek kehidupan. Sebagai dampaknya eksistensi bangsa Indonesia yang pluralis pun kini terancam karena kebebasan yang kebablasan. Eksistensi bangsa Indonesia yang pluralistik terancam jika dasar negara dan konstitusi (Pancasila dan UUD 1945) tidak dijadikan ukuran dan acuan dalam berpikir serta berperilaku sebagai warga negara, sementara gempuran globalisasi terus menerus terjadi.

B. Ekonomi Berbasis Pancasila

Di era krisis moral ini sudah sepatutnya kita berintrospeksi diri dan kembali mengenang serta menjunjung tinggi nilai etika ketuhanan dan kemanusiaan dalam bersikap, berpikir, dan bertindak sebagai makhluk ekonomi (*homo economicus*) agar dalam praktek ekonomi tidak mengabaikan nilai agama, sosial dan budaya. Etika-etika kehidupan berbangsa dan bernegara sejatinya sudah ada dalam dasar negara yaitu Pancasila. Makna sila-sila dalam Pancasila yaitu:

Tabel 1
Makna Sila-Sila dalam Pancasila

Sila	Pancasila	Makna
1.	Ketuhanan yang Maha Esa	Mengandung nilai spiritual memberikan yang seluas-luasnya kepada semua pemeluk agama dan penganut kepercayaan, memberikan yang seluas-luasnya kepada semua pemeluk agama dan penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk berkembang di Indonesia . Nilai ini berfungsi sebagai kekuatan mental, spiritual, dan landasan etika dalam Ketahanan Nasional.
2.	Kemanusiaan yang adil dan beradab	Bermakna nilai satu derajat, sama dan hak, saling mencintai, hormat menghormati, keberanian membela kebenaran dan keadilan, toleransi dan nilai gotong royong.
3	Persatuan Indonesia	Mengandung nilai-nilai kebangsaan ,cinta tanah air dan rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara
4.	Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan	Mengandung nilai-nilai kedaulatan berada di tangan rakyat (Demokrasi) yang diikuti oleh persatuan nasional yang riil dan wajar . Meskipun nilai ini mengutamakan kepentingan Negara/bangsa akan tetapi tetap menghargai kepentingan pribadi dan golongan , musyawarah untuk mufakat dan menjunjung tinggi harkat dan martabat serta nilai kebenaran dan keadilan
5.	Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia	Bermakna bahwa seluruh rakyat Indonesia berhak mendapatkan keadilan, baik dalam bidang hukum, ekonomi, politik, kesehatan, pendidikan, maupun kebudayaan sehingga tercipta masyarakat yang adil dan makmur dan sejahtera

Semua makna yang ada didalam Pancasila bisa diterapkan didalam UMKM, dan Koperasi Rakyat, dengan berporos pada ekonomi berbasis Pancasila, karena semua makna dari sila Pancasila sudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari terutama bagi rakyat kecil yang berada di pelosok desa, dalam penerapannya tidak akan mengalami kendala.

C. Pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Menurut Rudjito, (2003) Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Indonesia yang memiliki peranan yang penting dalam perekonomian Indonesia, baik ditinjau dari segi jumlah usaha maupun dari segi penciptaan lapangan kerja. Definisi UMKM yang diberikan oleh beberapa lembaga, yaitu dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah bahwa yang dimaksud Usaha Mikro adalah Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi Usaha Mikro, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Kegiatan bisnis di Indonesia sebagian besar didominasi oleh masyarakat melalui bingkai Ekonomi Kreatif (selanjutnya disebut Ekraf) dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (selanjutnya disebut UMKM). Pemilihan bingkai ini karena konsepnya yang sederhana dan terjangkau khususnya bagi masyarakat menengah ke bawah. Meskipun demikian, para pelaku Ekraf dan UMKM juga harus mengikuti perkembangan zaman agar tidak kalah dengan perusahaan besar dan mampu bersaing di pasar secara ketat dan kompetitif. Untuk itulah mereka harus menyesuaikan dengan keberadaan digital menggunakan media internet dan dunia maya atau digital. Pemberdayaan masyarakat melalui iptek digitalisasi UMKM Desa menjadi sangat penting dilakukan dalam era informasi sekarang ini (As'ad Sonief et al., 2019).

D. Ekosistem Ekonomi Digital

Tantangan UMKM untuk berkembang memang cukup beragam, sebab sangat terkait dengan rasio kewirausahaan di Indonesia yang baru mencapai 3,5%. Oleh sebab itu, peningkatan kualitas UMKM menjadi hal mutlak agar kedepan dapat tercipta kondisi kemudahan untuk berusaha. Perlu diketahui bahwa UMKM selama ini telah berperan penting dalam penguatan ekonomi Pancasila Indonesia. Bahkan berdasarkan pengalaman saat terjadinya krisis ekonomi Indonesia, UMKM telah menjadi salah satu pilar fundamental dan penyangga ekonomi Indonesia. Sedangkan di masa pandemi Covid-19, sektor UMKM cukup mengalami stagnan dan oleh sebab itu harus tetap eksis melalui strategi transformasi digital. Berdasarkan data BPS per September 2020, kondisi yang dihadapi UMKM dimasa pandemi Covid-19 ternyata hanya ada 45% pelaku UKM yang hanya mampu bertahan selama 3 bulan, selebihnya tidak dapat bertahan.

Dalam upaya pengembangan UMKM digital, salah satu alternatif yang dilakukan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) adalah mengajak para inovator muda untuk mendukung program digitalisasi UMKM melalui program Pahlawan Digital UMKM. Program ini bertujuan agar selama masa pandemi Covid-19 ini, para pelaku UMKM tetap dapat bertahan dengan peningkatan penjualan dengan dukungan ekosistem digital. Sebab, hingga saat ini hanya sekitar 10-11 juta UMKM yang terhubung dengan ekosistem digital.

Kemenkop UKM memiliki strategi pengembangan digitalisasi UMKM melalui empat langkah yaitu:

1. Peningkatan sumber daya manusia dengan mempersiapkan pelaku usaha UMKM agar kapasitasnya bisa meningkat. Dikarenakan kualitas sumber daya manusia menjadi hal utama bagi pengembangan UMKM di era digitalisasi. Sebab banyak pelaku UMKM yang mengakui menemui banyak kendala dalam penggunaan digitalisasi dan media sosial karena minimnya pengetahuan (Purwana, et al, 2017). Padahal pelaku UMKM juga harus

- memiliki banyak pengetahuan dalam pemanfaatan market place, media sosial hingga aplikasi. Bahkan, pelaku UMKM dapat juga memperelajari cara menganalisis opini publik di media sosial yang lagi trend dengan aplikasi Drone Emprit Academic (Arianto, 2020)
2. Mengintervensi perbaikan proses bisnis pelaku UMKM yang kemudian diturunkan ke dalam beberapa program. Selain teknik pemasaran juga diperlukan pengetahuan mengenai pentingnya literasi keuangan bagi para pelaku UMKM. Sebab literasi keuangan akan bisa membuat para pelaku UMKM mengatur dengan sistematis unit usahanya terutama terkait persoalan utang piutang. Literasi keuangan ini juga melingkupi tata cara pencatatan akuntansi UMKM. Sebab sebagian besar pelaku UMKM di Indonesia belum melakukan pencatatan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) karena terdapat kendala dalam implementasinya. Kendala tersebut disebabkan oleh kurangnya kualitas laporan keuangan UMKM (Mubiroh & Sari, 2020).
 3. Perluasan akses pasar yang salah satunya mendorong sinergisitas antara Kementerian Koperasi dan UKM dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) agar pelaku UMKM bisa menjadi vendor pengadaan barang dan jasa pemerintah.
 4. Mengglorifikasi pahlawan lokal pelaku UMKM. Pahlawan lokal pelaku UMKM ini syaratnya adalah, pemantik, pemberdaya, memiliki brand yang kuat, dan secara keseluruhan mampu mengagregasi usaha Mikro dan Kecil untuk berlabuh ke platform digital ataupun ke pasar internasional (ekspor). Selain itu dalam masa pandemic Covid-19 untuk membangkitkan kembali kondisi ini diperlukan solusi mitigasi dan pemulihan yakni dengan menciptakan stimulus pada sisi permintaan dan mendorong platform digital untuk memperluas kemitraan. Selain itu diperlukan kerjasama dalam pemanfaatan inovasi dan teknologi yang dapat menunjang perbaikan mutu dan daya saing produk proses pengolahan produk, pengolahan produk hingga pada pemasaran (depkop.go.id, 2020).

Pembahasan

A. Peran Pemerintah terhadap kelangsungan UMKM

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja, memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan Kebijakan Pemerintah melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam pengembangan usaha para pengusaha mikro dan kecil.

Prinsip pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang telah tertuang pada pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah yaitu :

1. Penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan Usaha Mikro, Kecil dan menengah untuk berkarya dengan prakarsa sendiri.
2. Perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan.
3. Pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
4. Peningkatan daya saing Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
5. Penyelenggaran perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian secara terpadu

B. Strategi Penerapan Ekonomi berbasis Pancasila pada UMKM.

Masuknya era globalisasi menjadikan bangsa dunia hampir tidak memiliki batas. Bahkan Mubyarto (1999) mengatakan globalisasi memang bukan musuh yang harus diperangi. Namun tetap saja kita harus ekstra waspada menghadapinya, jika kita tidak ingin di "jarah"nya.

Berdasar pernyataan tersebut tentunya globalisasi memiliki dampak baik dan buruk. Saat ini dampak tersebut sudah masuk dan dirasakan apalagi jika berkaitan dengan perekonomian, masuknya globalisasi tentu akan diikuti adanya paham kapitalis yang sangat individualis dan menjunjung asas keuntungan semata

Kenyataan yang ada Pemerintah dalam praktiknya secara fisik lebih mementingkan kaum berduit atau konglomerat, karena para konglomerat lebih dekat dengan negara dan mereka lebih banyak membayar pajak serta tidak dapat dipungkiri untuk menduduki jabatan dalam suatu lembaga peran mereka sangat besar. Pada prakteknya sistem kerakyatan tidak bisa mensejahterakan rakyat itu sendiri. Mubyarto (2002) mengatakan sistem ekonomi suatu negara haruslah sistem yang melayani rakyat banyak, sementara sistem ekonomi yang ada hanya melayani perusahaan besar. Berdasarkan hal tersebut tujuan dari penelitian ini menganalisis bagaimana eksistensi dari implementasi ekonomi kerakyatan sebagai sub sistem perekonomian yang berdasar Pancasila menghadapi gempuran kapitalisme global?

Ekonomi Pancasila dirumuskan berdasar asas kebersamaan dan kekeluargaan, berbasis pada ideologi Pancasila dan UUD 45, di mana dalam Pancasila tersebut manusia mencari keseimbangan antara hidup sebagai pribadi, dan hidup sebagai anggota masyarakat. Jika kita mencermati lebih dalam lagi tentang Pasal 33 Ayat (1) UUD 1945 terlihat bahwa sistem perekonomian Indonesia menganut asas kekeluargaan. Asas kekeluargaan dipandang sebagai asas bersama yang bermakna dalam konteks sekarang yaitu persaudaraan, humanisme, dan kemanusiaan. Jadi ekonomi tidak dipandang sebagai wujud sistem persaingan liberal akan tetapi ada nuansa moral dan kebersamaannya, sebagai refleksi dari tanggung jawab social

C. Transformasi UMKM menuju era digital

Kegiatan bisnis di Indonesia sebagian besar didominasi oleh masyarakat melalui bingkai Ekonomi Kreatif (selanjutnya disebut Ekraf) dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (selanjutnya disebut UMKM). Pemilihan bingkai ini karena konsepnya yang sederhana dan terjangkau khususnya bagi masyarakat menengah ke bawah. Meskipun demikian, para pelaku Ekraf dan UMKM juga harus mengikuti perkembangan zaman agar tidak kalah dengan perusahaan besar dan mampu bersaing di pasar secara ketat dan kompetitif. Untuk itulah mereka harus menyesuaikan dengan keberadaan digital menggunakan media internet dan dunia maya atau digital. Pemberdayaan masyarakat melalui iptek digitalisasi UMKM Desa menjadi sangat penting dilakukan dalam era informasi sekarang ini (As'ad Sonief et al., 2019).

Dengan semakin banyaknya usaha kecil dan menengah yang terlibat dalam ekonomi digital melalui broadband, e-commerce, media sosial, cloud, dan mobile platforms, UKM dapat bertumbuh lebih cepat dari segi pendapatan dan penyediaan lapangan kerja, serta menjadi lebih inovatif dan lebih kompetitif untuk menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (Prabowo, 2018)

Digitalisasi bukan hanya hal-hal yang berkaitan dengan ekonomi atau bisnis saja. Digitalisasi harus diproteksi dengan instrumen lainnya agar pelaksanaan bisnis para pelakunya sesuai harapan dengan mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dan meminimalisir adanya resiko yaitu kerugian baik materiil atau immateriil. Digitalisasi ini merupakan sarana yang telah difasilitasi oleh Negara melalui pengesahan beberapa Peraturan Perundang-Undangan.

Pelaku bisnis mulai menggunakan teknologi informasi dan telekomunikasi untuk menjalankan maupun menunjang kegiatan bisnis mereka. Pergerakan dan perubahan cara berbisnis yang kian cepat ke arah digitalisasi ini memaksa pelaku bisnis untuk beradaptasi mengikuti perubahan tersebut. Bagi perusahaan besar, perubahan pola bisnis yang mengarah pada proses digitalisasi ini tidak terlalu mengalami kendala dikarenakan dengan karakteristik perusahaan besar yang memiliki sumber daya yang cukup baik. Namun, bagi UMKM proses digitalisasi ini akan membutuhkan banyak persiapan (Idah & Pinilih, 2020)..

Kesimpulan

Pandemi Covid-19 telah membuat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mengalami stagnan hingga ada yang harus menutup gerainya. Hal itu disebabkan, perubahan kebiasaan baru dengan penerapan protokol kesehatan yang berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat. Dalam konteks ekonomi Indonesia, pandemi Covid 19 akhirnya dapat mendorong terciptanya ekosistem baru yaitu kewirausahaan digital. Dengan kata lain, ekosistem ini telah mendorong para pelaku UMKM untuk mulai bertransformasi ke ranah digital. Meski begitu selama ini pemerintah telah berupaya mendorong program digitalisasi pada UMKM di Indonesia. Hal itu dapat dilacak dari adaptasi para pelaku UMKM untuk menggunakan market place dan media sosial dalam pemasaran digital. Peranan platform media sosial juga telah menjadi tumpuan utama para pelaku UMKM. Selain itu pelaku UMKM juga mulai beradaptasi menggunakan berbagai aplikasi pendukung seperti platform keuangan digital. Transformasi digital pada UMKM di masa pandemi Covid-19 ini akhirnya dapat membuat UMKM kembali mengembangkan usahanya. Dengan demikian, pengembangan UMKM digital di masa pandemi Covid-19 bisa menjadi salah satu alternatif penyelamatan sektor UMKM agar tetap eksis. Meski demikian, upaya pengembangan UMKM digital juga harus didukung oleh peran pemerintah dan Kementerian Koperasi dan UKM. Dikarenakan pelaku UMKM masih membutuhkan banyak dukungan, bimbingan dan permodalan yang notabene berasal dari pemerintah di masa pandemic Covid-19. Bila terjadi sinergisitas antara UMKM, pemerintah dan stakeholder pendukung lainnya maka bisa dipastikan proses transformasi digital UMKM akan dapat berjalan sempurna. Sehingga target pemerintah untuk memperbanyak UMKM berbasis digital dapat segera terwujud. Selain itu, pengembangan UMKM digital pasca pandemi Covid19 juga harus menjadi prioritas utama pemerintah dan semua stakeholder agar ekosistem ekonomi digital di Indonesia tetap berjalan dengan baik. Sebab, pengembangan UMKM digital juga akan ikut berkontribusi dalam memperkuat ekosistem kewirausahaan digital di Indonesia. Pada akhirnya artikel ini berpendapat ini bahwa pengembangan UMKM digital di masa pandemi Covid-19 dapat menjadi salah satu alternatif pengembangan UMKM di era ekonomi digital. Selain itu pengembangan UMKM digital juga menjadi salah satu strategi penyelamatan UMKM agar tetap eksis di masa pandemi Covid-19. Lebih lanjut, berbagai program pengembangan digitalisasi UMKM dapat mempercepat proses transformasi digital dalam ekosistem ekonomi digital Indonesia, yang bis.

Daftar Pustaka

- As'ad Sonief, A., Nuraini, Y., & Arief Setyabudi, S. (2019). Digitalisasi Industri Kecil dan Produk Pertanian Daerah Upaya Untuk Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Karangbendo Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi. *Journal of Innovation and Applied Technology*, 5(1), 842–847. <https://doi.org/10.21776/ub.jiat.2019.005.01.5>
- Idah, Y. M., & Pinilih, M. (2020). Strategi Pengembangan Digitalisasi UMKM. *Prosiding Seminar Nasional Dan Call for Papers "Pengembangan Sumber Daya Pedesaan Dan Kearifan Lokal Berkelanjutan IX,"* 9(1), 195–204
- Prabowo, H. (2018). Pengembangan Ekonomi Kreatif Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Menuju Koperasi Berbasis IT. *Maqdis:Jurnal Kajian Ekonom Islam*, <https://doi.org/https://journal.febi.uinib.ac.id/index.php/maqdis/article/view/15>.